

IV. HASIL DAN PEMBAHASAAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Keadaan Geografis

Berdasarkan data dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 8.915.016 Hektar. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01°05'00'' Lintang Selatan sampai 02°25'00'' Lintang Utara atau antara 100°00'00'' Bujur Timur-105°05'00'' Bujur Timur.

Pada daerah daratan Riau terdapat 15 sungai, di antaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai prasarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke empat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan itu dipengaruhi pasang surut laut.

Batas-batas daerah Riau adalah:

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara

Daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1700-4000 mm per tahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim

hujan. Daerah yang paling sering ditimpa hujan selama tahun 2012 adalah Kota Pekanbaru 214 kali, Kabupaten Rokan Hulu 191 hari, Kota Dumai 163 kali, Kabupaten Kampar 147 kali dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah hari hujan 140 kali.

Jumlah Curah Hujan tertinggi pada tahun 2012 terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi dengan curah hujan sebesar 4.081,0 mm, disusul Kabupaten Kampar sebesar 2.846,1 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kabupten Indragiri Hilir sebesar 1.722,0 mm.

Selanjutnya menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2012 menunjukkan 26,0 celcius dengan suhu maksimum 35,1 celcius dan suhu minimum 21,8 celcius.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru juga mengeluarkan data jumlah titik api. Pada tahun 2012, jumlah titik api paling banyak terdapat di Kabupaten Pelalawan dengan 922 titik api, disusul Kabupaten Rokan Hilir dengan 712 titik api serta Kabupaten Indragiri Hulu dengan 600 titik api, dan yang paling sedikit Kota Pekanbaru dengan 9 titik api.

4.1.2. Pemerintahan Daerah

Sebagai Provinsi, Riau dikepalai oleh seorang Gubernur/Kepala Daerah dengan satu orang Wakil Gubernur. Di dalam melaksanakan tugasnya, ada 3 organisasi perangkat staf pemerintahan daerah yaitu: Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di samping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan usaha, penyusunan rencana dan program kerja.

Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti) dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota.

Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada akhir tahun 2012 terdapat 163 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.759 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Riau pada tahun 2012 sebanyak 7.862 orang. Dari jumlah tersebut 4.572 adalah pegawai laki-laki dan 3.290 pegawai perempuan.

Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah PNS golongan III paling banyak, yaitu sebesar 4.516 orang, menyusul golongan II sebesar 2.403 orang dan golongan IV sebanyak 779 orang, sedangkan sisanya 164 orang adalah pegawai golongan I.

Lebih dari 85 persen PNS di Pemerintah Provinsi Riau memiliki pendidikan tertinggi yang ditamatkan setingkat SLTA hingga S1. PNS yang berpendidikan SLTA berjumlah 2.979 orang, Diploma III sebanyak 998 orang, Sarjana (S1) 2.771 orang

dan Pasca Sarjana 803 orang. Sementara PNS yang berpendidikan dibawah SLTA berjumlah 311 orang.

Selain pendidikan formal, pegawai negeri yang akan duduk di struktural wajib mengikuti pendidikan penjenjangan, mulai dari DIKLATPIM IV sampai DIKLATPIM I. Dari 7.862 orang pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintah Provinsi Riau, sebanyak 1.572 orang telah mengikuti pendidikan penjenjangan. Tingkatan yang paling banyak diikuti adalah DIKLATPIM IV yaitu sebanyak 952 orang dan selanjutnya DIKLATPIM III yang diikuti 492 orang pegawai negeri sipil.

4.1.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut hasil Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) adalah 5.538.367 jiwa, terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan.

Sementara banyaknya rumah tangga yang terdapat di Provinsi Riau pada tahun 2010 tercatat 1.328.461 rumah tangga dengan rata-rata penduduk 4 jiwa per rumah tangga.

Sensus Penduduk (SP) dilaksanakan 10 tahun sekali. Dan berdasarkan data SP 2010, proyeksi penduduk Riau tahun 2012 berjumlah 5.929.172 jiwa.

Distribusi penduduk 2012 menurut kabupaten/ kota menunjukkan bahwa penduduk Riau terkonsentrasi di Kota Pekanbaru sebagai ibukota provinsi dengan jumlah penduduk 964.558 jiwa atau sekitar 16,27 persen dari seluruh penduduk Riau. Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 183.135 jiwa.

Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Riau 8,05 persen, dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp.310.603,-. Pemerintah selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya.

Transmigrasi merupakan program pemerintah dalam usaha pemerataan penduduk. Hingga tahun 2012, Provinsi Riau masih menjadi daerah tujuan transmigrasi. Pada tahun 2012 realisasi penempatan Transmigran di Provinsi Riau adalah 16 kepala keluarga atau 69 jiwa, berasal dari APPDT.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan (*supply*) tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup akan menimbulkan pengangguran dan setengah pengangguran.

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 2012 (Sakernas 2012) menunjukkan bahwa di Provinsi Riau komposisi antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerja untuk penduduk berusia 15 tahun keatas tidak jauh berbeda di semua kabupaten/kota. Angkatan kerja penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibanding bukan angkatan kerja. Sementara pada penduduk perempuan, bukan angkatan kerja justru lebih banyak dibanding angkatan kerja, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga.

Kabupaten dengan persentase angkatan kerja terbesar adalah Kepulauan Meranti dan Bengkalis, masing-masing sebesar 70,44 persen dan 67,11 persen. Sedangkan nilai persentase angkatan kerja terkecil adalah Rokan Hulu sebesar 58,48 persen. Dari total angkatan kerja yang bekerja, ternyata sebagian besarnya terserap di

sektor Pertanian, diikuti oleh sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Hotel serta jasa-jasa.

Pada tahun 2013, PNS yang menjadi peserta aktif Taspen berjumlah 101.588 orang yang terdiri dari PNS Pusat sebanyak 13.129 orang (12,92 persen), PNS Daerah Otonom sebanyak 88.433 orang (87,05 persen), dan Pejabat Negara sebanyak 26 orang (0,03 persen). Pejabat Negara di setiap wilayah terdapat dua orang yaitu kepala daerah dan wakilnya. Jumlah pensiunan keadaan bulan April 2013 adalah 26.773 orang atau bertambah 5,62 persen dari 25.348 orang pada April 2012. Sementara pembayaran pensiunan yang dilakukan oleh Taspen meningkat 19,19 persen dari tahun sebelumnya.

4.1.4. Sosial

a. Pendidikan

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

b. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Bila pada tahun 2010 terdapat 50 buah rumah sakit, 200 puskesmas, 816 puskesmas pembantu, tahun 2011 jumlah rumah sakit menjadi 54, puskesmas 201 dan puskesmas pembantu 836. Pada tahun 2010 data jumlah para medis (dokter) 1.858 orang yang terdiri dari 592 spesialis, 939 dokter umum dan 327 dokter gigi. Data tahun 2011 menunjukkan jumlah para medis (dokter) 1.602 orang yang terdiri dari 167 spesialis, 932 dokter umum dan 503 dokter gigi. Namun data jumlah paramedis pada tahun 2011 ini belum lengkap karena ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum memberikan data terbaru.

Guna menanggulangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, pemerintah sejak tahun 70-an melaksanakan program Keluarga Berencana. Tujuan Keluarga Berencana adalah tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera melalui upaya perencanaan dan pengendalian jumlah kelahiran.

c. Agama

Guna mengarahkan kehidupan beragama untuk amal dan kepentingan bersama telah disediakan tempat-tempat ibadah menurut agama yang dianut baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Data yang dikumpulkan dari Kanwil Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2011 di Provinsi Riau terdapat 6.166 mesjid dan 1.629 gereja.

d. Sosial Lainnya

Data tahun 2011 menunjukkan angka bencana alam yang terjadi di Provinsi Riau yang mengakibatkan 7.669 orang menderita dan 315 rumah hancur. Sedangkan jumlah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk beras adalah sebesar 28.200 kg.

4.1.5. Sumber Daya Sektoral

Luas lahan di Provinsi Riau berdasarkan data yang dikumpulkan Badan Pertanahan Nasional mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Luas lahan basah Provinsi Riau menjadi 829.914,33 hektar dari 87.347,72 hektar pada tahun 2010 dan luas lahan kering mencapai 274.779,38 dari 3.676.348,31 hektar pada tahun sebelumnya.

Data statistik pertanian yang disajikan dalam bab ini terbagi dalam 5 sub sektor yaitu : Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

a. Pertanian Tanaman Pangan

Sub sektor tanaman pangan terdiri dari tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Data tanaman pangan meliputi luas panen dan produksi tanaman bahan makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selama periode 2011 luas panen tanaman padi mengalami sedikit penurunan sebesar 7,47 persen yaitu dari 156.088 hektar menjadi 145.242 hektar. Panen padi sawah terluas di Kabupaten Rokan Hilir, sementara panen padi ladang terluas di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada tahun 2011 ini, produksi tanaman padi sebesar 535.788 ton, terdiri dari 481.911 ton padi sawah dan 53.877 ton padi ladang.

b. Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik di tingkat nasional maupun regional. Tanaman perkebunan yang

merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini ialah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan cengkeh.

Data luas dan produksi tanaman perkebunan tahun 2011 yang dikumpulkan dari Dinas Perkebunan menunjukkan adanya perubahan luas areal tanaman pada komoditi kelapa sawit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit 2.256.538 hektar, kelapa 521.019 hektar, karet 498.907 hektar dan kopi 4.725 hektar dengan produksi tanaman kelapa sawit 6.932.572 ton, kelapa 470.370 ton, karet 344.538 ton dan kopi 2.107 ton.

c. Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak.

Populasi ternak pada tahun 2011 tercatat: sapi 164.707 ekor, kerbau 38.300 ekor, sapi perah 180 ekor, kambing 196.115 ekor, domba 3.985 ekor, dan babi 47.449 ekor.

Informasi lain yang diperoleh dari Dinas Peternakan adalah jumlah ternak yang dipotong. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 47.838 ekor sapi, 6.598 ekor kerbau, 41.083 ekor kambing, 391 ekor domba dan 21.722 ekor babi. Sementara itu produksi daging sapi tahun 2011 sebesar 8.773 ton. Sedangkan produksi telur pada tahun 2011 sebanyak 4.161.488 butir yang berasal dari ayam petelur, ayam kampung dan itik.

d. Perikanan

Produksi perikanan di Provinsi Riau sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data yang bersumber dari Dinas Perikanan dan Kelautan menunjukkan bahwa pada

tahun 2011, dari sejumlah 195.194,7 ton total produksi ikan, sebanyak 90.505,3 ton atau 46,4 persen merupakan hasil perikanan laut dan budidaya sedangkan 104.689,4 ton hasil dari perairan umum, tambak , jarring apung dan kolam keramba.

Samping itu, informasi bahwa kabupaten/ kota sebagai penghasil ikan terbanyak pada tahun 2011 adalah Kabupaten Rokan Hilir 50.821,3 ton (26,04 persen), Kabupaten Kampar 41.100,5 ton (21,06 persen) dan Kabupaten Indragiri Hilir 40.674,1 ton (20,84 persen) sisanya sebanyak 62.588,8 ton (32,06 persen) tersebar di kabupaten/kota lainnya.

Data kuantitatif lainnya yang dikumpulkan dari Dinas Perikanan menunjukkan bahwa nilai produksi perikanan pada tahun 2011 tercatat 3.220,9 miliar rupiah lebih sedangkan pada tahun 2010 sebesar 1.969,7 miliar rupiah.

Tabel 4.1. Produksi Perikanan menurut Jenis dan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Perikanan Laut+Budi Daya <i>Sea Fishery+ Cultivated</i>	Perairan Umum <i>Open Water</i>	Tambak <i>Brackish Pond</i>	Jaring Apung <i>Floating Net</i>	Kolam Keramba <i>Fresh Water</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kuantan Singingi	-	89,0	-	-	3.444,7	3.533,7
02. Indragiri Hulu	-	2.336,1	-	-	677,3	3.013,4
03. Indragiri Hilir	32.407,7	2.211,8	5.585,6	-	479,0	40.684,1
04. Pelalawan	3.468,1	1.596,9	124,0	-	6.704,2	11.893,2
05. Siak	405,4	1.062,7	-	-	705,7	2.173,8
06. Kampar	-	1.657,5	-	16.625,0	22.818,0	41.100,5
07. Rokan Hulu	-	1.170,2	-	-	2.936,1	4.106,3
08. Bengkalis	2.321,0	-	3,2	-	1.071,0	3.395,2
09. Rokan Hilir	48.125,1	2.061,4	32,0	-	602,8	50.821,3
10. Kepulauan Meranti	2.678,3	-	5,7	-	1.873,7	4.557,7
71. Pekanbaru	-	100,1	-	28.630	56,5	28.786,6
73. Dumai	1.099,7	-	2,5	-	26,7	1.128,9
Jumlah/ <i>Total</i>						
2011	90.505,3	12.285,7	5.753,0	45.255,0	41.395,7	195.194,7
2010	77.113,5	12.191,2	1.812,3	-	41.873,0	132.990,0
2009	75.517,5	12.380,6	690,6	-	35.263,0	123.851,7
2008	87.919,2	13.977,7	876,9	-	29.387,5	132.161,3
2007	102.090,2	14.355,0	268,2	-	28.349,0	148.904,1

Sumber : Propinsi Riau Dalam Angka 2013

Tabel 4.2. Nilai Produksi menurut Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya

Tahun <i>Year</i>	Perikanan Laut <i>Sea Fishery</i>	Perairan Umum <i>Open Water</i>	Budidaya <i>Cultivated</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	986.879.050	439.920.881	1.794.173.571	3.220.973.502
2010	942.078.850	362.753.850	664.949.632	1.969.782.332
2009	899.451.600	344.422.800	502.532.613	1.746.407.013
2008	1.373.694.300	341.399.600	406.834.860	2.121.928.760
2007	1.268.943.455	269.659.061	75.550.362	1.614.152.878

Sumber : Propinsi Riau Dalam Angka 2013

Kehutanan

Hutan menurut fungsinya dibagi menjadi hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi konversi. Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan susunan tanah dan isinya sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya.

Luas hutan berdasarkan Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah 8,6 juta hektar. Bila dirinci menurut fungsinya seluas 228.793,82 hektar (2,66 persen) merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektar (18,67 persen) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektar (21,12 persen) adalah hutan produksi terbatas dan 531.852,65 hektar (6,19 persen) adalah hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39 hektar (49,75) merupakan hutan produksi konversi.

Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan tata guna hutan di Provinsi Riau pada tahun 2011 tercatat seluas 1,2 juta hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir 237.157,08 hektar atau 18,91 persen diikuti Kabupaten Kampar seluas 190.832,82 hektar atau 15,22 persen dan Kabupaten Bengkalis seluas 151.149,12 hektar atau 12,05 persen.

4.1.6. Transportasi dan Komunikasi

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2011, panjang jalan 4.167,78 km, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya namun data kabupaten/ kota tidak tersedia.

Jalan dalam kondisi baik sepanjang 1.102,06 km (26,44 persen), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 1.547,24 km (37,12 persen), dan 36,43 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Jumlah jembatan pada tahun 2011 sebanyak 1.012 unit. Sementara jumlah jembatan menurut konstruksinya, 302 unit jembatan beton, 474 unit jembatan komposit, 85 unit jembatan kayu dan 151 unit jembatan rangka.

Pembangunan dan perawatan jalan dan jembatan ini dapat mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 di Riau.

Pada tahun 2011, pengiriman surat melalui kantor pos di Provinsi Riau sejumlah 180.360 surat, sementara penerimaan surat sejumlah 461.159 surat. Sebagian besar surat tersebut dikirim dan diterima melalui Kantor Pos Pekanbaru, yaitu 83,25 persen pengiriman dan 89,06 persen penerimaan.

Jumlah pengiriman surat tercatat tahun 2011 sebanyak 408.718 paket, terdiri dari 404.975 paket dalam negeri dan 3.743 paket luar negeri.

4.1.7. Pendapatan Regional

Hingga kini alat untuk mengukur tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah secara tepat sulit ditemukan, namun secara tidak langsung, salah satu ukuran yang dianggap dapat mendekati pencapaian kemakmuran tersebut yakni dengan menggunakan angka pendapatan regional.

Manfaat pendapatan regional antara lain adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian pada suatu periode di suatu daerah tertentu.

Dari hasil penghitungan PDRB Riau yang telah dilakukan oleh BPS Riau dapat disajikan angka-angka pendapatan regional secara seri dari tahun ke tahun.

a. Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi dunia cenderung terus membaik yang secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tentu saja termasuk Riau. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas, maka telah terjadi kenaikan dari 214,55 triliun rupiah pada tahun 2010 meningkat menjadi 253,39 triliun rupiah pada tahun 2011. Demikian pula angka PDRB atas dasar harga konstan 2000 tanpa migas tahun 2011 mencapai sebesar 52,36 triliun rupiah yang lebih tinggi dari tahun 2010 yakni sebesar 48,64 triliun rupiah.

Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas menunjukkan peningkatan dari 345,66 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi

413,35 triliun rupiah pada tahun 2011. Peningkatan tersebut juga terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan migas, dari 97,70 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi 102,61 triliun rupiah pada tahun 2011.

b. Pendapatan Regional Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai alat mengukur kemajuan pembangunan ekonomi suatu daerah adalah pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh melalui nilai nominal PDRB dikurangi pajak tak langsung netto dan dikurangi lagi penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Pendapatan regional per kapita Riau termasuk migas atas dasar harga berlaku adalah sebesar 65,85 juta rupiah tahun 2011 lebih besar dari angka tahun 2010 sebesar 57,06 juta rupiah. Begitu juga dengan pendapatan regional perkapita atas dasar harga konstan 2000, tahun 2010 sebesar 16,13 juta rupiah kemudian naik menjadi 16,35 juta rupiah pada tahun 2011.

Sementara itu bila diamati pendapatan regional per kapita tanpa migas atas dasar harga berlaku juga terjadi peningkatan dari tahun 2010 sebesar 35,42 juta rupiah menjadi 40,37 juta rupiah pada tahun 2011, demikian pula bila diamati atas dasar harga konstan 2000 telah terjadi peningkatan dari 8,03 juta rupiah di tahun 2010, kemudian naik menjadi 8,34 juta rupiah pada tahun 2011.

4.2. Analisis factor-faktor yang mempengaruhi produksi perikanan ditinjau secara makro dalam penentuan sector basis dan non basis serta kebijakan sub sector perikanan budidaya di Provinsi Riau.

4.2.1. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Pada dasarnya sektor-sektor dalam perekonomian dapat dibagi ke dalam dua sektor besar, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah sektor-sektor yang mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar di daerah sendiri, bahkan dapat mengekspor barang dan jasanya ke luar daerah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor yang hanya mampu memenuhi atau melayani kebutuhan atau pasar daerahnya sendiri, bahkan harus mengimpor dari luar daerah yang bersangkutan.

Analisis LQ digunakan untuk menentukan apakah suatu sektor usaha merupakan sector basis atau bukan, dengan ketentuan :

a. Ketika $LQ < 1$ (*Net Impor*)

Dalam situasi ini produksi local diasumsikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga sector tersebut dianggap *Non-Basic*.

b. Ketika $LQ > 1$ (*Net Export*)

Dalam situasi ini, pangsa suatu industri tertentu dari ekonomi lokal (kabupaten/kota) lebih besar dari pangsa industri tersebut pada ekonomi provinsi, diasumsikan cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga sector tersebut dianggap *Basic*.

c. Ketika $LQ = 1$ (*Self-Sufficiency*)

Dalam situasi ini, pangsa suatu industri tertentu dari ekonomi lokal (kabupaten/kota) sama dengan pangsa industri tersebut pada ekonomi tingkat

provinsi. Produksi lokal diasumsikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal, sehingga sector tersebut dianggap Non-Basic.

Hasil analisis LQ sector perikanan Provinsi Riau tahun 2013 disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Hasil Analisis LQ Sektor Perikanan Provinsi Riau Tahun 2013

No	Kab/Kota	LQ		
		Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya	Perikanan Pengolahan
1	Rohil	1.43	<u>0.03</u>	2.30
2	Bengkalis	1.27	<u>0.51</u>	<u>0.11</u>
3	Dumai	1.29	<u>0.26</u>	3.08
4	Siak	1.08	<u>0.87</u>	<u>0.38</u>
5	Inhil	1.43	<u>0.15</u>	<u>0.51</u>
6	Pelalawan	<u>0.77</u>	1.53	<u>0.18</u>
7	Rohul	<u>0.64</u>	1.75	<u>0.74</u>
8	Kampar	<u>0.04</u>	3.01	<u>0.17</u>
9	Inhu	1.04	<u>0.98</u>	<u>0.12</u>
10	Kuansing	<u>0.10</u>	2.90	<u>0.06</u>
11	Pekanbaru	<u>0.13</u>	2.59	3.91
12	Kep. Meranti	1.26	<u>0.35</u>	2.75

Hasil analisis menunjukkan LQ dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub sector perikanan tangkap menjadi ekonomi basis bagi Kabupaten Rohil, Bengkalis, Dumai, Siak, Inhil, Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan disamping dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, juga memberikan peluang untuk diekspor ke wilayah lainnya. Dapat dikatakan pula bahwa wilayah tersebut terspesialisasi pada sektor perikanan.

Sedangkan bagi Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi dan Pekanbaru, perikanan tangkap tidak menjadi sector basis sehingga untuk memenuhi kebutuhannya harus mengimpor dari wilayah lain.

2. Sebaliknya, sub sector perikanan budidaya menjadi sector basis bagi Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi dan Pekanbaru sehingga daerah-daerah ini dapat mencukupi kebutuhan ikan dari hasil budidaya, Daerah-daerah ini hanya sedikit memiliki perairan laut, maka untuk pemenuhan ikan dilakukan dengan budidaya di kolam atau keramba.
3. Tidak semua daerah melakukan pengolahan hasil perikanannya, hanya beberapa kabupaten yang menjadikan pengolahan hasil perikanan sebagai mata pencarian masyarakatnya. Kabupaten Rokan Hilir, Dumai, Pekanbaru dan Kep. Meranti merupakan daerah yang menjadikan pengolahan hasil perikanan sebagai ekonomi basis.

4.2.2. Analisis SWOT

Diperlukan suatu strategi yang cocok dengan karakteristik dan permasalahan masyarakat yang ada dalam mengembangkan sektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya pada Desa Sialang pasung sebagai sentra perikanan Budidaya ikan laut. Strategi dan arah kebijakan harus mencakup lima aspek yaitu :

- a. *Pro poor* (Keberpihakan kepada upaya pengentasan kemiskinan) *Pro-poor* dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.

- b. *Pro job* (Keberpihakan kepada peningkatan tenaga kerja) Pendekatan Pro-job dilakukan melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum tergarap untuk menurunkan tingkat pengangguran nasional. Usaha membuka lapangan kerja diiringi dengan dukungan pengembangan modal dan kepastian berusaha.
- c. *Pro growth* (Keberpihakan kepada pertumbuhan) Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan sektor kelutan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan, dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan modernisasi.
- d. *Pro sustainability* (Keberpihakan kepada lingkungan hidup) Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil
- e. *Pro Environment* (Keberpihakan kepada pemulihan / ramah lingkungan) Pendekatan pro-environment dilakukan melalui upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Analisis SWOT didasarkan pada asumsi bahwa strategi yang efektif adalah dengan memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), serta meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Analisis lingkungan adalah proses awal dalam manajemen strategi, meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis faktor internal bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sedangkan analisis faktor eksternal bertujuan mengetahui peluang dan ancaman terhadap usaha pengembangan usaha sektor perikanan di Propinsi Riau.

4.2.2.1. Analisis Lingkungan Internal

Berdasarkan hasil analisis faktor internal, faktor-faktor yang menjadi kekuatan dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya Propinsi Riau antara lain :

1. Sumberdaya manusia dalam usia produktif

Usia pelaku usaha rata-rata berada pada usia produktif dan memiliki pengalaman dalam usaha budidaya ikan.

2. Peningkatan produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya yang terus mengalami peningkatan menjadikan sumber bahan baku pengolahan perikanan selalu tersedia.

3. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sebagai lembaga formal memegang peranan penting dalam pengembangan berbagai macam usaha yang ada. Pemerintah merupakan pemberi subsidi, pembuat kebijakan dan pelanggan dari berbagai organisasi. Oleh karena itu, faktor politik, pemerintah dan hukum dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi suatu usaha. Kebijakan terkait dengan pengembangan perikanan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP-RI) melalui Misinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai Visi “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015”, telah menetapkan beberapa strategi/kebijakan, yaitu :

- a. Memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi.
- b. Mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
- c. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
- d. Memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Sedangkan faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan dalam upaya pengembangan perikanan budidaya di Propinsi Riau antara lain :

1. Proses produksi belum optimal dan sederhana

Proses budidaya dilakukan secara sederhana dengan skala kecil (rumahan) dan bukan menjadi pekerjaan utama sehingga pengelolaan belum dilakukan secara profesional.

2. Kekuatan tawar yang rendah

Sistem penjualan yang dilakukan masing-masing pembudidaya memiliki kekuatan tawar yang lebih rendah dibanding penjualan yang dilakukan oleh kelompok.

4.2.1.7.1. Analisis Lingkungan Eksternal

Berdasarkan hasil analisis faktor eksternal, faktor-faktor yang menjadi peluang dalam upaya pengembangan sektor perikanan budidaya Provinsi Riau antara lain :

1. Pasar

Pemasaran merupakan kegiatan distribusi produk dari tangan produsen ke tangan konsumen.

a. Luasnya permintaan pasar.

Permintaan pasar yang tinggi tidak hanya berasal dari sekitar Riau tetapi juga daerah diluar bahkan ekspor luar negeri.

b. Pembeli mengambil langsung ke tempat sehingga dapat menekan biaya pemasaran dan menghemat waktu.

2. Ekonomi

Kondisi perekonomian yang labil akan mempengaruhi kegiatan usaha suatu usaha. Untuk saat ini kondisi perekonomian di Provinsi Riau dalam keadaan stabil oleh karena itu tidak mempengaruhi kegiatan perikanan budidaya.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam upaya pengembangan perikanan budidaya Provinsi Riau antara lain:

1. Tidak adanya jaminan harga dan Informasi pasar

Harga yang tidak stabil dan tidak adanya informasi pasar menyebabkan pembudidaya tidak mengetahui harga yang sebenarnya berlaku di pasaran, hal ini dapat mengurangi kemampuan tawar dengan pembeli.

2. Harga pakan yang terus meningkat

Pakan merupakan kebutuhan pokok dalam usaha budidaya, harga pakan yang terus meningkat bersifat merugikan pembudidaya. Peningkatan harga pakan dapat menurunkan hasil produksi yang akibatnya dalam mengganggu rantai bahan baku (*supply chain*) industry budidaya perikanan.

Tabel 4.4. Matriks SWOT Perikanan Budidaya

<p>Internal</p> <p>Eksternal</p>	<p><u>Kekuatan (S)</u></p>	<p><u>Kelemahan (W)</u></p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumberdaya manusia dalam usia produktif dan pengalaman 2. Produksi bahan baku pakan terus meningkat. 3. Bahan baku diproduksi sendiri. 4. Kebijakan Pemerintah yang mendukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses produksi belum optimal dan menggunakan teknologi yang sederhana. 2. Kekuatan tawar rendah
<p><u>Peluang (O)</u></p>	<p><u>Strategi SO</u></p>	<p><u>Strategi WO</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luasnya permintaan pasar 2. Pembeli mengambil langsung ke tempat 3. Kondisi perekonomian stabil 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kapasitas produksi. ➤ Membangun industry pengolahan untuk hasil budidaya baik oleh pemerintah maupun swasta. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengelolaan usaha secara professional. ➤ Membentuk lembaga (koperasi) yang dapat meningkatkan nilai tawar pengusaha.
<p><u>Ancaman (T)</u></p>	<p><u>Strategi ST</u></p>	<p><u>Strategi WT</u></p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya jaminan harga dan Informasi pasar 2. Harga pakan yang terus meningkat sehingga mengancam produksi bahan baku. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intervensi pemerintah terhadap harga di pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perbaiki tehnik produksi.

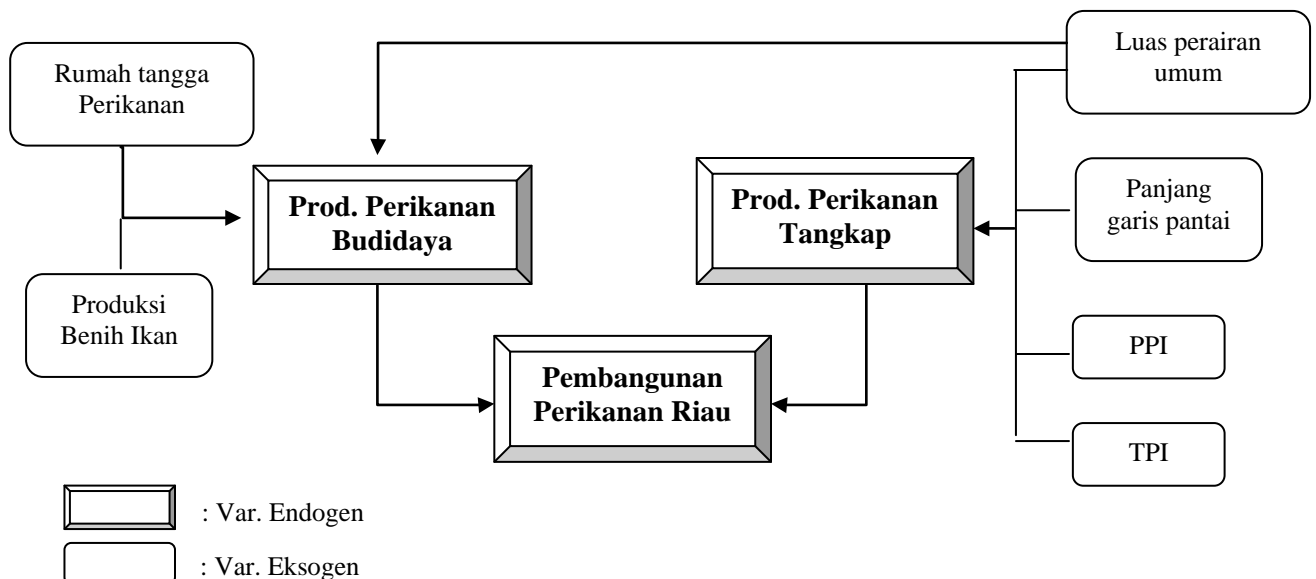
4.3. Analisis Pengaruh Kebijakan dan Strategi Pengembangan Terhadap Pembangunan Perikanan di Propinsi Riau

4.3.1. Analisis Model Ekonometrika

4.3.1.1. Spesifikasi Model

Model yang dibangun dalam penelitian ini terdiri dari dua model struktural yaitu model produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya. Dalam membangun model, parameter jumlah produksi digunakan sebagai data *proxy* keberhasilan pembangunan perikanan di Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan persamaan simultan, yang terdiri dari beberapa fungsi dimana setiap fungsi saling mempengaruhi. Simplifikasi model yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam Gambar 4.1.



Gambar 4.1. Hubungan Antar Variabel Model Pembangunan Perikanan Provinsi Riau

1. Model Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan penjumlahan produksi perikanan tangkap laut dan produksi perikanan tangkap umum. Produksi perikanan tangkap

dipengaruhi oleh luas perairan umum (LPU_t), panjang garis pantai (GP_t), fasilitas tempat pelelangan ikan, pelabuhan pelelangan ikan (PPI_t) Secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$PT_t = a_0 + a_1LPU_t + a_2 GP_t + a_3TPI_t + a_4PPI_t + U_1 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

PT_t = Produksi perikanan tangkap (Ton)

LPU_t = Luas Perairan Umum (Ha)

GP_t = Panjang Garis Pantai (Km)

TPI_t = Jumlah tempat pelelangan ikan (unit)

PPI_t = Pelabuhan pelelangan ikan (PPI_t)

2. Model Produksi Perikanan Budidaya

Dalam penelitian ini, jenis perikanan yang digolongkan dalam perikanan budidaya adalah perikanan tambak dan perikanan kolam dan keramba. Perikanan budidaya merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga perikanan budidaya (RTB_t), Balai Benih Induk (BBI_t), Produksi Benih Ikan (PBI_t), secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$PB_t = b_0 + b_1LPU_t + b_2 RTB_t + a_3PBI_t + U_2 \dots\dots\dots (2)$$

Dimana :

PB_t = Produksi perikanan budidaya tahun t (Ton)

RTB_t = Jumlah rumah tangga perikanan tahun (KK)

BBI_t = Jumlah balai benih induk (unit)

PBI_t = Produksi benih ikan (ekor)

PB_{t-1} = Lag Produksi perikanan budidaya t-1 (Ton)

4.3.1.2. Identifikasi Model

Menurut Koutsoyiannis (1977), identifikasi model mempunyai dua syarat, yaitu syarat order (order condition) dan syarat kondisi pangkat (rank condition).

Berdasarkan syarat order condition, kondisi identifikasi tercapai jika :

$$(K - M) \geq G - 1 \dots\dots\dots (3)$$

dimana :

K = Total variabel dalam model, yaitu *endogenous variables* dan *predetermine variables*.

M = Jumlah variabel endogen dan eksogen yang termasuk dalam satu persamaan tertentu dalam model,

G = Total persamaan dalam model, yaitu jumlah variabel endogen dalam model.

Jika $(K - M) = G - 1$, maka persamaan di dalam model tersebut dikatakan *exactly identified*, jika $(K - M) < G - 1$ dikatakan *unidentified*, dan jika $(K - M) > G - 1$, maka persamaan tersebut dikatakan *over identified*. Syarat model ekonometrika untuk persamaan simultan adalah hasil identifikasi model *exactly identified* atau *over identified*.

Dalam penelitian ini, terdapat 2 persamaan atau 2 variabel endogen (G), dimana predetermined variable (K) sebanyak 9 dan jumlah peubah dalam persamaan (M) sebanyak 4, sehingga model dikatakan *over identified*.

4.3.1.3. Pendugaan Parameter

Hasil pendugaan model ekonomi perikanan dalam penelitian ini cukup baik sebagaimana terlihat dari nilai koefisien determinasinya (R^2) dari masing-masing persamaan model Perikanan Budidaya (PB) sebesar 0.93 dan Perikanan Tangkap (PT) sebesar 0.99. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peubah-peubah penjelas (*exogenous variable*) yang ada dalam persamaan perilaku mampu menjelaskan dengan baik peubah endogen (*endogenous variable*).

Nilai statistik t digunakan untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas berpengaruh nyata terhadap peubah endogennya. Hasil statistik t yang diperoleh menunjukkan bahwa ada beberapa peubah penjelas yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap peubah endogennya. Dalam penelitian ini taraf α yang digunakan sebagai berikut :

- a. berbeda nyata dengan nol pada taraf $\alpha = 1\%$
- b. berbeda nyata dengan nol pada taraf $\alpha = 5\%$
- c. berbeda nyata dengan nol pada taraf $\alpha = 10\%$
- d. berbeda nyata dengan nol pada taraf $\alpha = 15\%$

4.3.1.4. Model Perikanan Budidaya (PB)

Hasil pendugaan model produksi perikanan budidaya disajikan pada Tabel 4.4. Berdasarkan hasil analisis, produksi perikanan budidaya secara nyata dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga budidaya/RTB (taraf nyata $\alpha=1\%$), produksi benih ikan/PBI (taraf nyata $\alpha = 10\%$).

Tabel 4.5. Hasil Pendugaan Parameter Model Perikanan Budidaya

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Variable Label
Intercept	1	-5164.79	1594.087	-3.24	0.0119	Intercept
RTB	1	4.542540	0.891074	5.10	0.0009	Jumlah Rumah tangga Budidaya (KK)
PBI	1	0.000064	0.000036	1.81	0.1079	Produksi Benih ikan (ekor)
LPU	1	0.093780	0.108035	0.87	0.4107	Luas Perairan Umum

$R^2 = 0.93$, F hitung = 38.64

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besaran nilai statistic R^2 pada persamaan produksi perikanan budidaya sebesar 0.93 artinya semua variable penjelas mampu menjelaskan variable endogen sebesar 93%, sedangkan sisanya 7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Dalam model ini, jumlah rumah tangga budidaya sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan budidaya. Hal ini sangat wajar karena semakin banyak rumah tangga yang berusaha dalam budidaya perikanan otomatis akan meningkatkan produksi. Selain itu, jumlah produksi benih yang dihasilkan oleh balai-balai benih induk sangat membantu pembudidaya dalam memperoleh bibit-bibit ikan yang berkualitas.

4.3.1.5. Model Perikanan Tangkap (PT)

Hasil pendugaan model produksi perikanan tangkap disajikan pada Tabel 4.5. Berdasarkan hasil analisis, produksi perikanan tangkap secara nyata hanya dipengaruhi oleh luas perairan umum/LPU (taraf nyata $\alpha = 10\%$), keberadaan tempat pelelangan ikan/TPI (taraf nyata $\alpha = 1\%$) dan Pelabuhan Penadaratan Ikan/PPI (taraf nyata $\alpha = 1\%$).

Tabel 4.6. Hasil Pendugaan Parameter Model Perikanan Tangkap

Variable	DF	Parameter Estimate	Standard Error	t Value	Pr > t	Variable Label
Intercept	1	316.4231	1315.649	0.24	0.8168	Intercept
LPU	1	0.036346	0.057269	0.63	0.0545	Luas Perairan Umum
GP	1	0.39398	9.039942	0.04	0.9665	Panjang garis pantai (km)
PPI	1	1231.295	70.41423	17.49	<.0001	Pelabuhan Pendaratan Ikan (unit)
TPI	1	6295.759	553.9511	11.37	<.0001	Tempat Pelelangan Ikan (unit)

$R^2 = 0.99$, F hitung = 140.80

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa besaran nilai statistic R^2 pada persamaan produksi perikanan budidaya sebesar 0.99 artinya semua variable penjelas mampu menjelaskan variable endogen sebesar 99%, sedangkan sisanya 1% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Dari tabel 4.4. dapat dilihat bahwa luas perairan sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap. Selain itu, keberadaan Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) juga berpengaruh sangat nyata terhadap produksi perikanan tangkap.

4.3.1.6. Validasi Model

Untuk melihat validitas model digunakan statistik proporsi bias (UM), proporsi regresi (UR), proporsi distribusi (UD) dan statistik *Theil's inequality coefficient* (U) untuk mengevaluasi kemampuan model bagi analisis simulasi historis. Nilai koefisien Theil (U) berkisar antara 1 dan 0, jika $U = 0$ maka pendugaan model sempurna, jika $U = 1$ maka pendugaan model naif. Pada umumnya suatu model dikatakan valid jika nilai U, UM, UR dan US kecil sedangkan UD dan UC tinggi.

Tabel 4.7. Validasi Model Faktor-faktor Pembangunan Perikanan Provinsi Riau

No	Nama Peubah	Bias (UM)	Reg (UR)	Dist (UD)	Var (US)	Covar (UC)	U
1	Prod. Perikanan Budidaya	0.00	0.00	1.00	0.02	0.98	0.11
2	Prod. Perikanan Tangkap	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.05

Berdasarkan Tabel 4.5. model memiliki nilai U, UM, UR dan US sangat kecil bahkan nol, sementara UD dan UC tinggi dan mendekati satu. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua model yang dibangun dikatakan valid.

4.3.2. Analisis Strategi Pengembangan Perikanan Propinsi Riau

Penyusunan strategi pengembangan perikanan Provinsi Riau dilakukan dengan pendekatan system yang terdiri dari tiga komponen/sub sistem utama yaitu sub sistem ekosistem alam, sumberdaya manusia dan manajemen. Sistem sebagaimana dijelaskan oleh para ahli merupakan kumpulan elemen-elemen/sub sistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Pengembangan perikanan Provinsi Riausangat terkait dengan program yang telah ada. Namun demikian, terdapat *gap* antara harapan atau output dengan realisasi. Oleh karena itu diperlukan adanya intervensi keadaan saat ini menjadi kondisi yang diinginkan yang dinamakan tranformasi.

4.3.2.1. Identifikasi elemen

Secara umum terdapat lima program pengembangan perikanan Provinsi Riau yang telah ditetapkan yaitu (1) Program pengembangan perikanan budidaya, (2) Program pengembangan perikanan tangkap, (3) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, (4) Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan (5) Reformasi birokrasi dan pelayanan public.

Dari hasil identifikasi sebelumnya terdapat 8 (delapan) isu strategis pengembangan perikanan Provinsi Riau yaitu (1) Tingginya tingkat kehilangan (*losses*), (2) Lemahnya jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, (3) Kurangnya intensitas promosi dan rendahnya partisipasi *stakeholders*, (4) Terbatasnya sarana penanganan ikan, (5) Kurangnya bahan baku industry, (6) Bahan baku belum standar, (7) Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya dan (8) Informasi teknologi terbatas

Tabel 4.8. Analisis Elemen Utama Program Pengembangan Perikanan Propinsi Riau

Kondisi saat ini	Output yang diharapkan	Transformasi (system yang harus diubah)
1. Perikanan Budidaya		
a. Harga pakan mahal b. Kualitas perairan menurun	a. Ketersediaan pakan yang murah b. Produksi dan pendapatan meningkat	Pengadaan pakan sendiri oleh pembudidaya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.
2. Perikanan Tangkap		
a. Armada dan alat tangkap terbatas b. Harga BBM terus meningkat c. Pencemaran perairan oleh limbah	Peningkatan hasil tangkapan dan pendapatan	a. Perbaikan armada dan peralatan tangkap b. Penertiban <i>IUU fishing</i>
3. Industri Pengolahan Perikanan		
a. Ketersediaan bahan baku tidak kontinyu serta tidak standar b. Teknologi pengolahan terbatas	Peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan dan pendapatan	Optimalisasi budidaya dan teknik penangkapan.
4. Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil		
a. Kurangnya promosi dan pengelolaan wisata bahari b. Kurangnya partisipasi stakeholder	Peningkatan nilai tambah sector ekowisata dan terlibatnya masyarakat sekitar	Promosi dan pendekatan dengan masyarakat sekitar lokasi ekowisata
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan public		
Pelayanan public yang rumit dan tidak transparan	Pelayanan public yang mudah dan transparan	Reformasi birokrasi

4.3.2.2. Strategi Pengembangan

Berdasarkan isu strategis, analisis *gap* antara pelaksanaan program dengan output yang diharapkan dapat disusun strategi pengembangan perikanan Provinsi Riau.

1. Analisis Faktor Internal (IFAS)

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan perikanan Provinsi Riau antara lain:

a. Potensi sumberdaya ikan

Provinsi Riau memiliki potensi perikanan baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap serta memiliki wilayah khusus yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan ekonomi yang berbasis perikanan tangkap dan budidaya (Minapolitan) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2010.

b. Adanya kelompok nelayan yang aktif

Nelayan di Provinsi Riau memiliki kelompok nelayan di tiap-tiap daerahnya dengan total kelompok aktif sebanyak 336 kelompok dengan jumlah anggota 1624 yang tersebar di lima kecamatan. Kelompok-kelompok nelayan ini merupakan binaan Dinas Kelautan dan Perikanan.

c. Peningkatan produksi perikanan budidaya

Kegiatan budidaya baik budidaya kolam maupun tambak mengalami peningkatan baik dari segi luasan maupun produksi. Hal ini didukung oleh keberadaan Balai Benih Ikan (BBI) yang berperan menyediakan benih kepada pembudidaya.

d. Tersedianya Fasilitas penunjang

Provinsi Riau telah memiliki PPI yang terbilang cukup lengkap dimana PPI tersebut dilengkapi dengan tempat lelang, pabrik es, tangki bahan bakar, *cold storage*, bahkan laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan.

e. Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah

- Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai institusi yang bersentuhan langsung dengan nelayan dengan berbagai program pemberdayaan baik dengan pendanaan dari APBD maupun APBN.
- Adanya perlindungan terhadap alat tangkap statis yang selanjutnya akan ditetapkan dalam PERDA.

Adapun faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan dalam pengembangan perikanan Provinsi Riau antara lain:

a. Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap

Keterbatasan modal dan peralatan tangkap merupakan masalah klasik dan utama bagi nelayan.

b. Rendahnya sumberdaya manusia nelayan

- Tingkat pendidikan nelayan yang umumnya rendah menyebabkan pengetahuan dan kemampuan adaptasi teknologi juga rendah sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan nelayan.
- Dengan pendidikan yang rendah, nelayan mengelola kegiatan usahanya dengan manajemen yang sederhana sehingga hasil usahanya tidak efisien.

- c. Penggunaan teknologi yang masih rendah dalam pengolahan hasil perikanan.
- d. Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran.

Tabel 4.9. Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS).

No	Faktor Internal	Bobot	Nilai	Skor
Kekuatan				
1	Potensi sumberdaya ikan	0.11	3	0.33
2	Adanya kelompok nelayan yang aktif	0.17	3	0.50
3	Peningkatan produksi perikanan budidaya	0.11	2	0.22
4	Tersedianya Fasilitas penunjang	0.11	3	0.33
5	Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah	0.11	2	0.22
Kelemahan				
1	Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap	0.11	2	0.22
2	Rendahnya sumberdaya manusia nelayan	0.11	3	0.33
3	Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran	0.17	4	0.67
Total		1.00	22	2.83

2. Analisis Faktor Eksternal (EFAS)

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dalam pengembangan perikanan Provinsi Riau antara lain:

- a. Peluang pasar yang besar
 - Ditingkat local, konsumsi ikan oleh masyarakat terus meningkat sehingga hasil produksi perikanan Provinsi Riau lebih banyak untuk konsumsi local.

- Lokasi geografis Provinsi Riau yang berdekatan dengan Selat Malaka memberikan keuntungan dalam kegiatan perdagangan dengan Negara tetangga. Selama ini, produk perikanan yang diekspor melalui pelabuhan Dumai berasal dari perikanan tangkap Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Hal ini merupakan peluang besar jika mampu dilakukan oleh nelayan dari Riau.
- b. Peluang untuk bekerjasama dengan investor asing
- Budidaya beberapa jenis ikan seperti bandeng di air payau telah dilakukan. Hal ini dapat digunakan untuk menarik investor yang akan menanamkan modal bagi kegiatan ini.
 - Provinsi Riau telah memiliki keunggulan dalam menarik investor dibanding daerah lain di Provinsi Riau karena memiliki infrastruktur yang cukup memadai seperti pelabuhan dengan taraf internasional serta PPI dengan fasilitas yang cukup lengkap.

Adapun faktor-faktor eksternal yang menjadi ancaman dalam pengembangan perikanan Provinsi Riau antara lain:

- a. Harga pakan terus meningkat
- Bagi pembudidaya, pakan merupakan input terbesar dalam kegiatan produksi. Peningkatan harga pakan dapat mengancam keberlangsungan usaha budidaya.
- b. Penurunan kualitas perairan
- Bagi kegiatan budidaya, penurunan kualitas perairan dapat mengancam kelangsungan budidaya yang dilakukan.

- Bagi nelayan tangkap, penurunan kualitas perairan berdampak pada penurunan jumlah ikan sehingga hasil tangkapan menurun.
- c. Harga BBM terus meningkat
- Bagi nelayan yang menggunakan solar dalam melaut, kenaikan harga BBM merupakan ancaman terbesar dalam melakukan kegiatan usahanya.
- d. *IUU fishing (Illegal, Unreported, Unregulated)* oleh nelayan luar daerah
- Letak Provinsi Riau yang bersebelahan dengan Selat Malaka dan Malaysia memberikan ancaman tersendiri terhadap pencurian hasil perikanan oleh kapal asing.
- e. Selektivitas alat tangkap belum diterapkan
- Penggunaan alat tangkap yang tidak selektif dapat merusak ekosistem perairan yang pada akhirnya akan menurunkan jumlah ikan.

Tabel 4.10. Matriks Faktor Strategi Eksternal (EFAS).

No	Faktor Eksternal	Bobot	Nilai	Skor
Peluang				
1	Peluang pasar yang besar	0.11	3	0.33
2	Peluang untuk bekerjasama dengan investor asing	0.11	2	0.22
3	Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang tinggi	0.11	3	0.33
Ancaman				
1	Harga pakan terus meningkat	0.17	3	0.50
2	Penurunan kualitas perairan (pencemaran)	0.11	3	0.33
3	Harga BBM terus meningkat	0.17	3	0.50
4	<i>IUU fishing</i> oleh nelayan luar daerah	0.11	3	0.33
5	Selektivitas alat tangkap belum diterapkan	0.11	2	0.22
Total		1.00	17	2.78

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal serta program yang dicanangkan pemerintah maka dapat disusun strategi pengembangan perikanan Provinsi Riau sebagai berikut:

a) Strategi S-O

✚ Pembinaan kelompok nelayan (S2, O1)

Pembinaan kelompok nelayan aktif yang berjumlah 46 kelompok perlu diintensifkan agar kelompok tersebut memiliki peningkatan posisi tawar dan kemampuan manajemen.

✚ Revitalisasi perikanan budidaya (S2, O1, O3)

Perikanan tangkap fluktuatif terhadap perubahan cuaca sehingga dapat disubstitusi oleh perikanan budidaya dimana dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan.

✚ Optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan seperti TPI/pelabuhan (S3, O2)

Fasilitas penunjang usaha perikanan seperti TPI/pelabuhan yang dimiliki Provinsi Riau relative lengkap namun pemanfaatannya belum optimal.

b) Strategi S-T

✚ Pengembangan pakan alternative (S3, T1)

Mahalnya harga pakan perlu diantisipasi dengan pakan buatan yang mampu diproduksi oleh pembudidaya dengan menggunakan bahan sekitar.

✚ Penegakan hukum bagi pelanggaran lingkungan dan IUU fishing (S5, T2, T4, T5)

Pelanggaran hukum seperti illegal fishing dan pencemaran lingkungan perlu penindakan tegas oleh pemerintah.

c) Strategi W-O

- ✚ Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan (W1, W2, O1, O3).

Salah satu hal penting tidak berdayanya nelayan adalah tidak berfungsi kelembagaan yang ada pada masyarakat nelayan. Diperlukan penguatan kelembagaan nelayan yang mampu meningkatkan kemampuan nelayan sehingga mereka “berdaya” dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

- ✚ Revitalisasi peran penyuluh (W2, W3, O1)

Peran penyuluh sebagai fasilitator dan agen pembawa informasi teknologi perlu ditingkatkan agar teknologi-teknologi perikanan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian dapat ditransfer kepada nelayan.

d) Strategi W-T

- ✚ Revitalisasi kelompok dalam mengakses permodalan (W1, T3)

Ketidakmampuan nelayan dalam mengakses permodalan salah satunya dikarenakan ketidakpercayaan lembaga keuangan untuk memberikan modal. Dibutuhkan daya untuk meningkatkan posisi tawar mereka yaitu melalui organisasi kelompok.

<p style="text-align: center;">Internal</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p><u>Kekuatan (S)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Potensi sumberdaya ikan Adanya kelompok nelayan yang aktif Produksi perikanan budidaya terus meningkat Tersedianya Fasilitas penunjang Dukungan Dinas Perikanan dan Kelautan dan pemerintah Daerah 	<p><u>Kelemahan (W)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan permodalan dan peralatan tangkap Rendahnya sumberdaya manusia nelayan Program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah kurang bersinergi dan sering tidak tepat sasaran
<p><u>Peluang (O)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Peluang pasar yang besar baik pasar local maupun luar negeri. Adanya peluang untuk bekerjasama dengan investor asing Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang tinggi 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Optimalisasi produksi untuk memenuhi permintaan pasar (S1, S3, O1, O3) ➤ Pembinaan kelompok nelayan (S2, O1) ➤ Revitalisasi perikanan budidaya (S2, O1, O3) ➤ Optimalisasi pemanfaatan fasilitas penunjang perikanan seperti TPI/pelabuhan (S4, O2) 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan (W1, W3, O1, O3). ➤ Revitalisasi peran penyuluh (W2, W3, O1)
<p><u>Ancaman (T)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Harga pakan terus meningkat Penurunan kualitas perairan Harga BBM terus meningkat <i>IUU fishing</i> oleh nelayan luar daerah Selektivitas alat tangkap belum diterapkan 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan pakan alternative (S3, T1) ➤ Penegakan hukum bagi pelanggaran lingkungan dan <i>illegal fishing</i> (S5, T2, T4, T5) 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revitalisasi kelompok untuk meningkatkan mengakses permodalan (W1, T3)

Dari hasil analisis SWOT terdapat sejumlah alternative strategi pengembangan perikanan Provinsi. Pemilihan prioritas strategi berdasarkan rangking dengan nilai tertinggi, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel.4.11. Alternatif Pemilihan Strategi Pengembangan Perikanan Provinsi Riau

Unsur SWOT	Keterkaitan	Jumlah Skor	Rangking
SO1	S1, S3, O1, O3	1.22	3
SO2	S2, O1	0.83	6
SO3	S2, O1, O3	1.17	4
SO4	S4, O2	0.56	9
WO1	W1, W3, O1, O3	1.56	1
WO2	W2, W3, O1	1.33	2
ST1	S3, T1	0.72	7
ST2	S5, T2, T4, T5	1.11	5
WT1	W1, T3	0.72	8

Berdasarkan hasil perhitungan prioritas strategi melalui rangking, tiga alternative strategi dengan nilai tertinggi adalah:

- a. Perberdayaan kelompok nelayan melalui penguatan kelembagaan
- b. Revitalisasi peran penyuluh
- c. Optimalisasi produksi untuk memenuhi permintaan pasar

4.4. Analisis Indikator Makro Ekonomi dan Kelembagaan Faktor-Faktor Penentu Pembangunan Perikanan Propinsi Riau

4.4.1. Analisis Daya Saing (*Shift Share*)

Perikanan merupakan salah satu subsector dalam pertanian yang digunakan dalam penyusunan PDRB, yang terdiri dari lima sub sector yaitu tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan.

Subsector perikanan Provinsi Riau memberikan kontribusi yang cukup penting bagi perekonomian. Persentase sumbangan subsector perikanan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan pada Tabel 4,12, berikut.

Tabel 4.12. Sumbangan Subsector Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2009

No	Kab/Kota	PDRB (Rp Juta)	% Kontribusi
1	Rohil	2,458,565.68	20.42
2	Bengkalis	456,864.78	3.79
3	Dumai	24,607.64	0.20
4	Siak	10,008.95	0.08
5	Inhil	1,722,667.55	14.30
6	Pelalawan	140,447.00	1.17
7	Rohul	87,505.80	0.73
8	Kampar	134,512.94	1.12
9	Inhu	98,061.28	0.81
10	Kuansing	109,542.34	0.91
11	Pekanbaru	10,877.75	0.09
12	Kep. Meranti	150,431.34	1.25

Sumber : BPS Provinsi Riau

Bagi Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir subsector perikanan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB masing-masing sebesar 20.42 persen dan 14.30 persen. Tingginya sumbangan subsector perikanan

berasal dari perikanan tangkap. Sementara untuk Kabupaten/Kota yang lain, sumbangan subsector perikanan terhadap PDRB hanya dibawah 5.0 persen.

Sampai dengan tahun 2012, produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir masih menyumbangkan nilai terbesar dengan nilai masing-masing 39,169.80 ton dan 33,998.40. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, Kabupaten Kampar menduduki peringkat teratas dengan nilai produksi 28,510.00 ton. Produksi perikanan per Kabupaten/Kota tahun 2012 disajikan pada Tabel 4.13 berikut.

Tabel 4.13. Produksi Perikanan Tahun 2012 (Ton)

No	Kab/Kota	Produksi (Ton)			
		Tangkap	Budidaya	Pengolahan	Total
1	Rokan Hilir	39,169.80	450.88	2,021.78	41,642.46
2	Bengkalis	3,031.20	595.40	8.59	3,635.19
3	Dumai	878.80	87.82	67.20	1,033.82
4	Siak	1,425.00	558.75	15.94	1,999.69
5	Indragiri Hilir	33,998.40	1,799.81	386.70	36,184.91
6	Pelalawan	4,876.20	4,736.00	36.18	9,648.38
7	Rokan Hulu	1,883.00	2,511.00	69.69	4,463.69
8	Kampar	852.90	28,510.00	105.52	29,468.42
9	Indragiri Hulu	2,276.00	1,045.52	8.10	3,329.62
10	Kuansing	166.80	2,344.57	3.20	2,514.57
11	Pekanbaru	99.40	969.05	96.04	1,164.49
12	Kep. Meranti	637.50	87.51	44.65	769.66
Total		89,295.00	43,696.31	2,863.59	135,854.90

Analisis *shift share* digunakan untuk melihat struktur perekonomian atau digunakan untuk mengidentifikasi perubahan struktur / kinerja ekonomi daerah

terhadap struktur ekonomi yg lebih tinggi (provinsi atau nasional) sebagai referensi.

Dalam penelitian ini, analisis *shift share* subsector perikanan terhadap PDRB Provinsi Riau dengan menggunakan data PDRB Kabupaten/Kota atas dasar harga berlaku tahun 2009 dan tahun 2007 sebagai pembanding. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.14. berikut.

Tabel 4.14. Hasil Analisis *Shift Share* Subsektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Riau

No	Kab/Kota	Komponen Pertumbuhan		
		PS	IM	RS
1	Rokan Hilir	902,547.57	-18,506,352.05	-183,341.99
2	Bengkalis	171,539.55	-43,287,964.63	458,607.02
3	Dumai	8,699.97	-4,822,945.29	-207,958.37
4	Siak	3,969.53	-26,870,785.58	1,675,525.83
5	Indragiri Hilir	645,613.36	-11,741,312.17	104,375.81
6	Pelalawan	55,572.96	-8,100,246.47	486,999.63
7	Rokan Hulu	32,124.28	-6,216,034.25	-61,474.70
8	Kampar	49,979.32	-13,131,106.66	13,214.80
9	Indragiri Hulu	37,348.41	-7,579,400.24	180,516.24
10	Kuansing	38,737.02	-6,472,189.66	-277,828.22
11	Pekanbaru	4,408.48	-15,959,583.23	1,334,430.07
12	Kep. Meranti	55,172.23	-4,069,292.30	-43,734.69

Hasil analisis shift share pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komponen Pertumbuhan Provinsi (*Provincial Share/PS*)

Komponen Pertumbuhan Provinsi (*Provincial Share/PS*) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan atau pergeseran struktur perekonomian suatu daerah

(kabupaten/kota) dengan melihat nilai PDRB daerah pengamatan pada periode awal yang dipengaruhi oleh pergeseran pertumbuhan perekonomian daerah yang lebih tinggi (provinsi). Hasil perhitungan tersebut akan menggambarkan peranan wilayah provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian daerah kabupaten.

Hasil analisis komponen pertumbuhan menunjukkan bahwa sektor perikanan pada seluruh kabupaten/kota bernilai positif, hal ini mengindikasikan bahwa sektor perikanan dalam perekonomian daerah menempati posisi yang baik untuk daerah yang bersangkutan.

b. Komponen Pertumbuhan Proporsional (*Industry Mix/IM*)

Komponen Pertumbuhan Proporsional/bauran industri (*Industry Mix/IM*) merupakan pertumbuhan Nilai Tambah Bruto suatu sektor i dibandingkan total sektor di tingkat provinsi. Berdasarkan hasil analisis semua kabupaten/kota memiliki IM negative yang artinya kesempatan kerja sector perikanan tumbuh dibawah kesempatan kerja tingkat provinsi.

c. Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (*Regional Shift/RS*)

Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (*Regional Shift, RS*), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten) dan nilai tambah bruto sektor yang sama di tingkat provinsi. Selain itu juga menunjukkan perubahan PDRB atau kesempatan kerja dalam suatu wilayah terhadap wilayah lainnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai yang produksi perikanananya tinggi justru nilai RS-nya negative, hal ini

mengindikasikan bahwa perubahan kesempatan kerja atau PDRB sector perikanan di Rokan Hilir relative lebih lambat dibanding kabupaten/kota lain yang nilai RS-nya positif.

Dalam analisis Shift Share (SS) terdapat 4 kuadran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja sektor-sektor yang terdapat dalam suatu wilayah, yaitu (1) kuadran I; sektor di daerah ini pertumbuhannya cepat, tetapi relatif tidak berdaya saing (IM positif tetapi RP negative), (2) kuadran 2, sektor yang berada di daerah ini mempunyai pertumbuhan yang cepat dan berdaya saing (IM dan RP positif), (3) kuadran III, pertumbuhan sektornya lambat dan relatif tidak berdaya saing (PP dan PPW sama-sama negatif) dan (4) kuadran IV, sektor di daerah ini pertumbuhannya lambat, tetapi daya saingnya relatif baik (PP bernilai negatif, tetapi PPW positif).

Tabel 4.15. Hasil Evaluasi Kinerja Sector Perikanan

No	Kab/Kota	Komponen		Kuadran
		IM	RS	
1	Rokan Hilir	-18,506,352.05	-183,341.99	III
2	Bengkalis	-43,287,964.63	458,607.02	I
3	Dumai	-4,822,945.29	-207,958.37	III
4	Siak	-26,870,785.58	1,675,525.83	I
5	Indragiri Hilir	-11,741,312.17	104,375.81	I
6	Pelalawan	-8,100,246.47	486,999.63	I
7	Rokan Hulu	-6,216,034.25	-61,474.70	III
8	Kampar	-13,131,106.66	13,214.80	I
9	Indragiri Hulu	-7,579,400.24	180,516.24	I
10	Kuansing	-6,472,189.66	-277,828.22	III
11	Pekanbaru	-15,959,583.23	1,334,430.07	I
12	Kep. Meranti	-4,069,292.30	-43,734.69	III

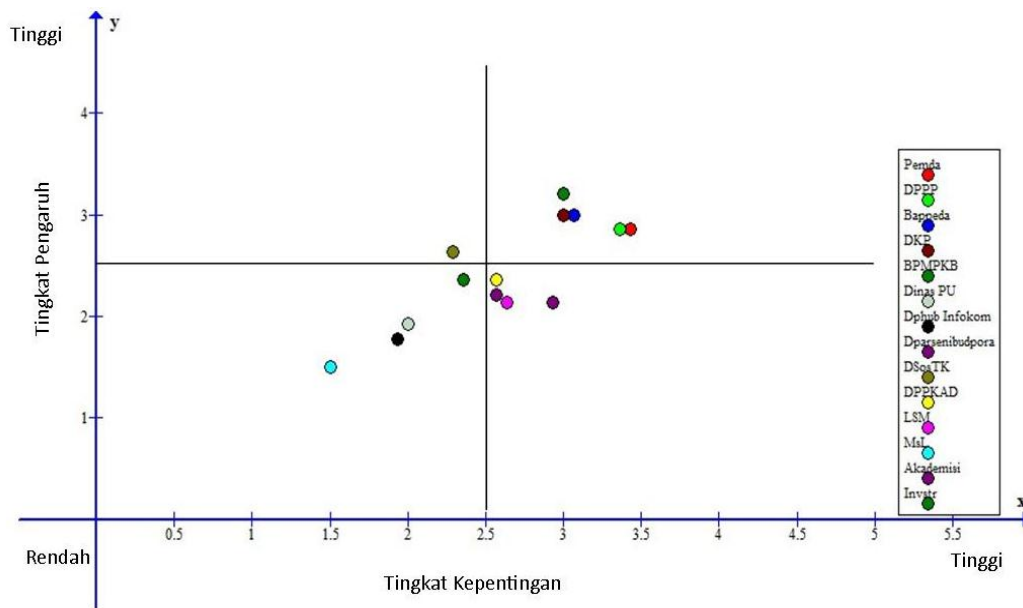
Dari hasil evaluasi sebagaimana dalam tabel di atas, analisis daya saing (*shift share*) sector perikanan kabupaten Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir, Pelalawan, Kampar, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru berada pada kuadran I yang artinya pertumbuhannya cepat namun relative tidak berdaya saing, sementara Kabupaten Rokan Hilir, Dumai, Rokan Hulu, Kuansing dan Kepulauan Meranti berada pada kuadran III yang artinya pertumbuhan sector perikanan lambat dan relative tidak berdaya saing.

4.4.2. Analisis Kelembagaan Pembangunan Perikanan

Dalam rangka membuat suatu kebijakan terkait pembangunan perikanan di wilayah Riau , maka diperlukan suatu kerjasama dari berbagai pihak untuk merumuskannya. Berbagai stakeholder dianggap berperan penting dalam merumuskan suatu kebijakan. Adapun stakeholder tersebut adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi terkait, masyarakat lokal, pengusaha, nelayan, akademisi serta LSM. Tentunya masing-masing pihak memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda dalam merumuskan suatu kebijakan.

Analisis stakeholder perlu dilakukan untuk menentukan pihak-pihak yang berkompeten dalam merumuskan kebijakan tersebut. Schmeer (2007) menyatakan analisis ini merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif dalam menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan ketika mengembangkan atau menerapkan suatu kebijakan. Stakeholder dapat diartikan sebagai individu, kelompok atau lembaga yang kepentingannya dipengaruhi oleh kebijakan atau pihak yang tindakannya secara kuat mempengaruhi kebijakan. Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kepentingan dalam kebijakan pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

Stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi merupakan stakeholder primer dimana kepentingannya dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan. Sedangkan stakeholder sekunder, kepentingannya dipengaruhi secara tidak langsung. Daftar stakeholder serta pengaruh dan kekuatannya dapat dilihat pada Tabel 4.2.



Gambar.4.2. Matriks Kepentingan dan Pengaruh *Stakeholder* dalam Pembangunan Perikanan di Propinsi Riau

Sumber: Hasil Analisis Data, 2014

Keterangan Stakeholder :

Pemerintah Daerah Riau DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau), Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas PU Riau, Dinas Perhubungan dan Infokom, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB), Deparsenbudpora (Dinas Pariwisata Seni Budaya Pemuda dan Olahraga), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Masyarakat Lokal, Akademisi, Investor/Pengusaha Luar.

Kepentingan *stakeholder* dalam pembangunan perikanan berkelanjutan di Propinsi Riau dipengaruhi oleh faktor ekologi, sosial, teknologi dan ekonomi. Pengaruh *stakeholder* yang berbeda-beda dalam kebijakan ini disebabkan oleh faktor politik, birokrasi dan struktural. Hasil dari kajian pada Tabel 4.8 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder*

dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.8.

Stakeholder yang dianalisis dalam penelitian ini adalah segenap pemangku kepentingan yang berkaitan dengan program-program pembangunan dan pengembangan perikanan propinsi Riau. Hasil analisis *stakeholder* menetapkan beberapa *stakeholder* primer yang akan diikuti sertakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan perikanan berkelanjutan di Propinsi Riau. *Stakeholder* primer dalam pembangunan perikanan berkelanjutan di Riau adalah Pemda, DKP ((Dinas Kelautan dan Perikanan) , Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB). *Stakeholder* primer yang diperoleh pada tahapan analisis ini memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka menjawab tantangan pembangunan perikanan berkelanjutan di Riau.